

SKRIPSI

**KONSTITUSIONALITAS PEMERINTAHAN NAGARI DI SUMATERA BARAT
SEBAGAI KESATUAN MASYARAKAT HUKUM ADAT
PASCA REFORMASI**

*Diajukan sebagai Syarat untuk Memperoleh Sarjana
Hukum di Fakultas Hukum Universitas Andalas*

OLEH :

FATRATUL WAHYUDI

1510112113

PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM TATA NEGARA



Pembimbing :

H. Ilhamdi Taufk, S.H., M.H

Beni Kharisma Arrasuli,SH.i., LL.M

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG

2019

KONSTITUSIONALITAS PEMERINTAHAN NAGARI DI SUMATERA BARAT SEBAGAI KESATUAN MASYARAKAT HUKUM ADAT PASCA REFORMASI

(Fatratul Wahyudi, 1510112113, Fakultas Hukum Universitas Andalas PK V
(Hukum Tata Negara), 71 Halaman)

ABSTRAK

Pemerintahan Nagari di Sumatera Barat sebagai kesatuan masyarakat hukum adat yang telah hidup dan berkembang sejak dahulu hingga sekarang. Hingga masuknya otoritas negara kedalam Pemerintahan Nagari di Sumatera Barat yang mengubah nagari menjadi desa melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa, hingga Pemerintah di Sumatera Barat dalam mempertahankan eksistensinya mengeluarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 13 Tahun 1983 tentang Nagari Sebagai Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dalam Daerah Provinsi Tingkat I Sumatera, Namun Perda tersebut tidak mampu mempertahankan eksistensi nagari. Dalam karya Ilmiah ini dengan memakai metode yuridis normatif rumusan permasalahan yang akan dikaji adalah terkait 1) Bagaimana konstitusionalitas atau perkembangan peraturan perundang-undangan Pemerintahan Nagari di Sumatera Barat sebagai Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Pasca Reformasi 2) Bagaimana peran Pemerintahan Nagari di Sumatera Barat sebagai kesatuan masyarakat hukum adat pasca reformasi. Dan hasil pembahasan dari rumusan masalah tersebut adalah pada pasca reformasi dengan jatuhnya rezim pemerintahan orde baru telah membawa perubahan dari sistem pemerintah sentralisasi menjadi desentralisasi. Pemerintah kemudian mengeluarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah atau dikenal undang-undang otonomi daerah yang memberikan peluang bagi dihidupkannya kembali bentuk pemerintahan terendah asli jika masyarakat setempat menginginkannya, undang-undang ini yang menjadi landasan kembalinya sistem Pemerintahan Nagari di Sumatera Barat dengan regulasi pertama yakni keluarnya Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 9 Tahun 2000 tentang Ketentuan Pokok Pemerintahan Nagari, selanjutnya Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Nagari, hingga yang terakhir Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 tahun 2018 tentang Nagari. Peraturan daerah tersebut lahir karena perkembangan undang-undang yang berlaku tentang pemerintah daerah yakni Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan yang terakhir Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Peraturan-peraturan tersebut yang menjadi landasan dalam menjalankan Pemerintahan Nagari di Sumatera Barat sebagai kesatuan masyarakat hukum adat dan juga terdapat pengakuan dalam konstitusi terkait kesatuan masyarakat hukum adat pada Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi: "Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang", maka dengan demikian Pemerintahan Nagari memiliki aturan dan regulasi yang jelas baik dalam konstitusi maupun peraturan perundang-undangan di bawahnya.